

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PENYIARAN BERLANGGANAN (TELEVISI KABEL) DAN PERANAN PEMERINTAH SEBAGAI PENGAWAS TERKAIT PERUBAHAN PAKET LAYANAN SECARA SEPIHAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Rifka Masriani

(1187025)

Masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, memerlukan pemenuhan atas kebutuhannya. Terkait dengan kebutuhan tersebut kebutuhan terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier. Di era moderen seperti sekarang ini, masyarakat memiliki kebutuhan sekunder, namun disamping itu masyarakat juga memerlukan kebutuhan lainnya seperti media penyiaran. Media memberikan suatu program televisi yang dapat menjangkau lebih banyak program siaran baik dalam maupun luar negeri yang sekarang disebut dengan televisi berlangganan salah satunya adalah X TV. Namun pada praktiknya pelaku usaha dalam melakukan perbuatan sering kali merugikan konsumen. Kerugian yang sering kali dialami konsumen tidak hanya perubahan perjanjian secara sepihak, tetapi paket layanan yang tidak sesuai dengan promosi, penghentian secara sepihak pengurangan program tanpa adanya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalam hal penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen maka pemerintah memfasilitasi adanya peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan meneliti fakta yang terjadi. Melalui metode penelitian tersebut maka penulis akan mendapatkan analisa mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan peranan pemerintah terhadap pelaku usaha jasa penyiaran berlangganan yang melakukan perubahan paket layanan secara sepihak.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat perubahan paket layanan secara sepihak. Pertanggungjawaban pelaku usaha secara perdata atas tindakan yang merugikan konsumen terkait perubahan paket layanan secara sepihak yaitu melakukan pemenuhan kewajiban dan denda. Disamping itu UUPK mengatur mengenai sanksi perdata, sanksi pidana dan pidana tambahan. Peran pemerintah terhadap pelaku usaha yang melakukan perubahan paket secara sepihak yaitu memfasilitasi adanya Badan Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Televisi Kabel, Perubahan Paket Layanan.

ABSTRACT

JURIDICAL RESPONSIBILITY OF CABLE TELEVISION BUSINESSES AND THE ROLE OF GOVERNMENT AS REDIRECT SUPERVISORY TO WARDS UNILATERAL CHANGE OF SERVICE PACKGE CORRELATED WITH REGULATIONS NUMBER 8 YEAR 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION AND BOOK III CIVIL LAW

Rifka Masriani

(1187025)

The society in order to achieve welfare is needed to fulfil their utilities. The utilities are divided into 3 (three) steps, which is primary utilities, secondary utilities, and tertiary utilities. In this modern era, the society has a secondary utility, however the society also demanded another utilities like broadcasting media. The media gives a television program which reach out more broadcasting program from domestic and overseas which called subscription television, one of them is X TV. Yet, in the field the businesses often harm the consumers. The disadvantage which often experienced by the consumers is not just unilateral change of agreement but also service package which is not in accordance with the promotion, unilateral termination, and program reduction without any further information. In the term of dispute resolution between businesses and consumer then the government facilitated the role of Consumer Dispute Resolution Agency to resolve the dispute.

The method used is Juridical Normative using primary, secondary, and tertiary law. The characteristic of the research is descriptive analysis, in which describe and examine the facts that occurred. With that research method the author will get the analysis about the responsibility of businesses and government role towards broadcasting service businesses which perform unilateral change of service package.

The Law of Consumer Protection and The Book of Civil Law give the warranty of legal protection to disadvantaged consumers from the result of unilateral change of service package. The accountability of businesses in the civil law for actions that harm consumer is fulfilling the needs and fines. Besides that the Law of Consumer Protection is regulation the civil sanctions, criminal sanctions, and additional sanctions. The role of government towards the businesses who perform unilateral change of service package is facilitating with the presence of Dispute Resolution Agency to resolve the dispute.

Keywords : *Businesses, Cable Television, Change of service package.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN	24
A. Perjanjian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	24
1. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.....	24
a. Pengertian Perikatan.....	24
b. Pengertian Perjanjian.....	25
c. Kolerasi Antara Perikatan dan Perjanjian.....	27
2. Asas-asas Perjanjian.....	28
3. Keabsahan Perjanjian Menurut KUHPerdara.....	32
4. Wanprestasi dalam Perjanjian.....	42
5. Akibat Wanprestasi.....	45

6. Pemenuhan Kewajiban Para Pihak Di Dalam Terjadinya Suatu Wanprestasi.....	51
7. Saat Lahir dan Berakhirnya Suatu Perjanjian	54
8. Jenis-jenis Perjanjian	64
B. Pihak-pihak dan istilah Yang Terkait Dengan Konsumen.....	68
1. Pihak-pihak.....	69
a. Pelaku Usaha.....	69
b. Konsumen	71
c. Pemerintah	72
d. Barang dan Jasa.....	74
2. Bentuk Perjanjian Baku dalam Perjanjian Antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	75
BAB III PERAN PEMERINTAH DAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN.....	84
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	84
1. Pengertian dan Batasan Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.....	84
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	86
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	88
a. Hak Konsumen	88
b. Kewajiban Konsumen	94
c. Hak Pelaku Usaha	96
d. Kewajiban Jawab Pelaku Usaha	97
4. Tahap-tahap Transaksi Konsumen.....	100
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	102
6. Perbuatan yang Dilarang Oleh Pelaku Usaha.....	114
B. Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Lembaga Penyiaran di Indonesia dan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat....	119
1. Peranan Pemerintah	119
a. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan.....	119
b. Peranan Pemerintah	122

c. Fungsi Pemerintah	124
d. Asas-asas Pemerintahan Yang Baik.....	127
2. Penyiaran di Indonesia.....	129
a. Pengertian Penyiaran	129
b. Prinsip-prinsip Penyiaran.....	130
c. Lembaga-lembaga Penyiaran.....	132
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	134
a. Pengertian dan Susunan keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	134
b. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	135
BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PENYIARAN BERLANGGANAN (TELEVISI KABEL) DAN PERANAN PEMERINTAH TERHADAP PAKET SECARA SEPIHAK DIHUBUNGKAN DENGAN UUPK DAN BUKU II KUHPERDATA	137
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) Terhadap Perubahan Paket Secara Sepihak	137
B. Peran Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan Yang Melakukan Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak	156
BAB V PENUTUP.....	162
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN	170